

**SKRIPSI**

**“ANALISIS DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MASYARAKAT PT. AMMAN MINERAL TAMBANG BATU HIJAU  
TERHADAP KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT  
DI KECAMATAN LUNYUK KABUPATEN SUMBAWA  
TAHUN 2017-2018”**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Starata Satu (S1) pada Program Studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram



**OLEH :  
RADIANTO  
(21513A0023)**

**JURUSAN SOSIAL  
PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**“ANALISIS DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MASYARAKAT PT. AMMAN MINERAL TAMBANG BATU HIJAU  
TERHADAP KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT DI  
KECAMATAN LUNYUK KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017-2018”**



Disusun dan diajukan oleh:

**RADIANTO**  
NIM. 21513A0023

**PROGRAM STUDI  
STUDI PEMERINTAHAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam sidang skripsi

Mataram, 09 Agustus 2019

Pembimbing I

Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.IP  
NIDN.0825038303

Pembimbing II

Selva, S.E., M.Sc  
NIDN.0811118601

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Studi Pemerintahan



Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP  
NIDN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

“ANALISIS DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MASYARAKAT PT. AMMAN MINERAL TAMBANG BATU HIJAU  
TERHADAP KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT DI  
KECAMATAN LUNYUK KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017-2018”



Disusun dan diajukan oleh

**RADIANTO**  
NIM. 21513A0023

**PROGRAM STUDI**  
**STUDI PEMERINTAHAN**

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: **09 Agustus 2019** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Tim Penguji,**

1. **Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.IP** Ketua (.....)  
NIDN.0825038303
2. **Selva, S.E., M.Sc** Anggota I (.....)  
NIDN.0811118601
3. **Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP** Anggota II (.....)  
NIDN.0822048901

Mengesahkan,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,

**Drs. Amil., M.M**  
NIDN. 0831126204

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun perguruan tinggi yan lain.
2. Karya tulis saya ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain walaupun ada cukup sebagai referensi, kecuali secara teknis dengan jelas mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeneran serta kepuasan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, serta lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 08 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan

  
  
METERAI  
TEMPEL  
1000  
RADIANTO  
NIM. 21513A0023



## **MOTO**

*“JIKA KAMU TIDAK TAHAN AKAN LELAHNYA  
BELAJAR, MAKA KAMU HARUS SANGGUP  
MENAHAN LELAHNYA DIBODOHI SEUMUR  
HIDUPMU”*

*~ Imam Syafi'i ~*

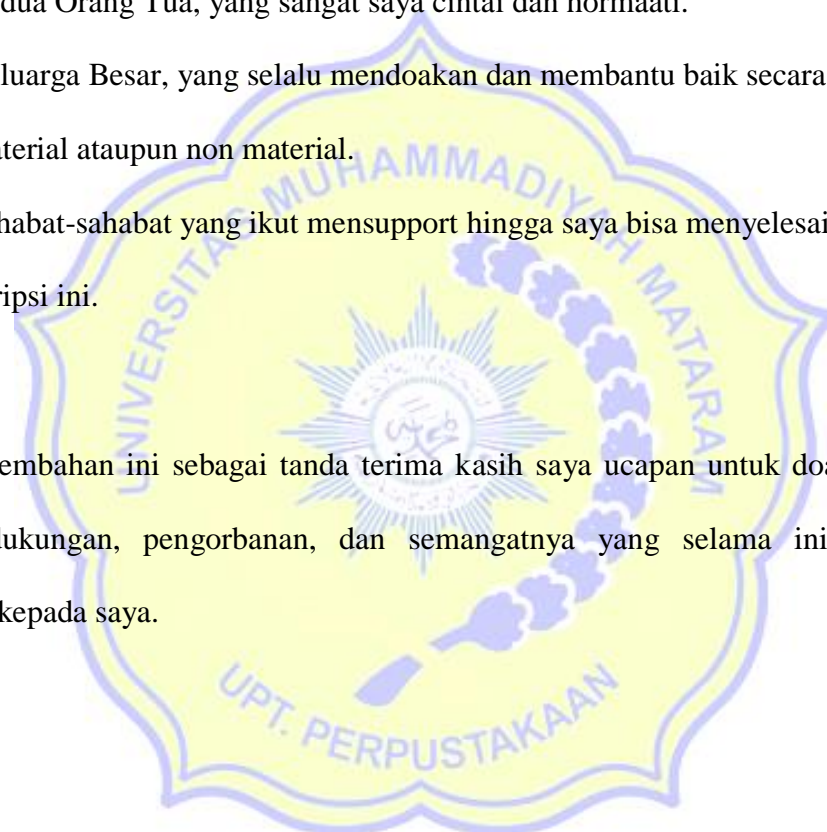


## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

- a. Kedua Orang Tua, yang sangat saya cintai dan hormaati.
- b. Keluarga Besar, yang selalu mendoakan dan membantu baik secara material ataupun non material.
- c. Sahabat-sahabat yang ikut mensupport hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Persembahan ini sebagai tanda terima kasih saya ucapkan untuk doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan semangatnya yang selama ini selalu diberikan kepada saya.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat anugrahnya dan kasih sayang yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Dampak Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat PT. Amman Mineral Tambang Batu Hijau Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2018”**.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram khususnya program studi pemerintahan dan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran beberapa pihak yang telah memberi dorongan bimbingan dan pengarahan. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.IP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Drs. Amil., M.M\_Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Mardiah, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP Selaku Kaprodi Studi Pemerintahan.

6. Bapak Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah melakukan pendampingan dalam proses penyelesaian proposal atau skripsi.
7. Ibu Selva, S.E., M.Sc Selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah melakukan pendampingan dalam proses penyelesaian proposal atau skripsi.
8. Semua Kaprodi dan Dosen yang telah mendidik penulis dari semester awal hingga akhir.
9. Kedua orang tua ku yang selalu saya banggakan Bapak Sudirman dan Ibu Siti Nurhayati serta keluarga besar yang selalu menjadi motivator utama dan selalu mendoakan, memberikan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal atau skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal atau skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna baik bagi segi sisi maupun penulisan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dengan ikhlas dari semua pihak demi menyempurnakan ke tahap selanjutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga proposal atau skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.



## Abstrak

Program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh PT. Tambang Amman Nusa Tenggara di Tambang Batu Hijau Sumbawa Elang-Dodo Rinti Blok tentang kehidupan masyarakat di sekitar radius tambang, yang terlihat dari tiga aspek yaitu, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Implementasi atau evaluasi program Corporate Social Responsibility (CSR) PT AMNT dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat baik secara ekonomi, pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa telah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan perubahan kualitas pola pikir masyarakat, komunitas untuk kemerdekaan terutama dalam kehidupan ekonomi yang lebih baik dan keinginan orang untuk berubah semakin meningkat. Dampak program CSR PT AMNT terhadap pengembangan pemberdayaan masyarakat (PPM) di Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa dengan bantuan ini setidaknya dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dalam radius area eksplorasi penambangan Blok Elang-Dodo Rinti.

**Kata kunci: Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT. AMNT, Pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pengembangan pendidikan, Meningkatkan layanan kesehatan.**

## **ABSTRACT**

*Economic empowerment program conducted by PT. Amman Mineal Nusa Tenggara in the Batu Hijau Mine Sumbawa Elang-Dodo Rinti Block on the life of the community around the mine radius, which is seen from three aspects namely, community economic empowerment, educational development and improving health services. This type of research used in this research is descriptive qualitative research. The implementation or evaluation of PT AMNT's Corporate Social Responsibility (CSR) program in relation to community empowerment both economically, education and health in the Lunyuk sub-district of Sumbawa regency has been running well as evidenced by the change in the quality of the mindset of the community for independence especially in a better economic life and people's desire to change is increasing. The impact of PT AMNT's CSR program on the development of community empowerment (PPM) in the Lunyuk sub-district of Sumbawa district with this assistance can at least help improve the community's economy in the radius of the Elang-Dodo Rinti Block mining exploration area.*

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility (CSR) Program of PT. AMNT, Community economic empowerment, Educational development, Improving health services.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Yang Relevan.....	10
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Evaluasi Kebijakan.....	13
2.2.2 Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan.....	13
2.2.3 Dimensi Evaluasi Kebijakan.....	15
2.2.4 Fungsi-Fungsi Evaluasi Kebijakan.....	18

2.3 Konsep Pemberdayaan .....	19
2.3.1 Pengertian Pemberdayaan .....	22
2.3.2 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi .....	22
2.3.3 Konsep Ekonomi Kerakyatan .....	29
2.3.4 Implementasi Ekonomi Kerakyatan .....	30
2.3.5 Ciri-Ciri Khusus Ekonomi Kerakyatan .....	33
2.4 Konsep Pembangunan Berkelanjutan .....	34
2.5 Konsep Pertambangan.....	38
2.5.1 Pengertian Pertambangan .....	38
2.6 PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT) .....	39
2.7 Kerangka Berpikir .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	41
3.3 Teknik Pengumpulan Informan .....	42
3.3.1 Populasi .....	42
3.3.2 Sampel.....	42
3.4 Instrumen Penelitian.....	43
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	43
3.5.1 Data Primer.....	43
3.5.2 Data Sekunder .....	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	45

3.6.1 Teknik Observasi.....	45
3.6.2 Teknik Wawancara.....	46
3.6.3 Teknik Dokumentasi .....	46
3.7 Teknik Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN</b>	
4.1 Deskripsi Wilayah Penelitian.....	49
4.2 Profil PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT) .....	49
4.3 Logo PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT) .....	50
4.4. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai PT. Amman Mineral Nusa Tenggara .....	51
4.5 Lokasi.....	52
4.6 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	53
4.6.1 Letak Geografis .....	54
4.6.2 Letak Demografi.....	54
4.7 Struktur Organisasi.....	56
4.8 Program Pemberdayaan Ekonomi oleh PT. AMNT Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa .....	57
4.8.1 Tipe Evaluasi Kebijakan .....	58
4.8.1.1 Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	58
4.8.1.2 Meningkatkan Pengembangan Pendidikan .....	67
4.8.1.3 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan.....	71
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	75
5.2 Saran.....	76



## DAFTAR TABEL

2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	10
3.1 Data Primer Dari Berbagai Narasumber .....	44
4.1 Luas Wilayah Desa dan Persentasenya di Kecamatan Lunnyuk Tahun 2019. ....	55
4.2 Jarak Desa ke Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten Tahun 2018 .....	55
4.3 Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Pada Desa Radius Tambang Batu Hijau dan sekitarnya.....	59
4.4 Banyaknya Sarana Perekonomian di Kecamatan Lunnyuk Dirinci per Desa Tahun 2017 .....	65
4.5 Banyaknya Sarana Pendidikan Menurut Jenis di Kecamatan Lunnyuk Dirinci per Desa Tahun pelajaran 2017/2018.....	68
4.6 Banyaknya Sekolah SD/MI dan Rombongan Belajar di Kecamatan Lunnyuk Dirinci per Desa Tahun Pelajaran 2017/2018. ....	69
4.7 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Lunnyuk Tahun 2017.....	73

## DAFTAR GAMBAR

- 4.1 Logo PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) sebelum berganti menjadi PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT). .....50
- 4.2 Logo baru PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) setelah berganti menjadi PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT).....51
- 4.3 Lokasi Proyek Batu Hijau .....52



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara termasuk batu hijau dan lain-lain dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan bahan galian, serta berisi kewajiban mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.

Dalam perusahaan bahan galian, pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah (lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan). Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, kedudukan pemerintah adalah memberikan izin kepada mereka yang bersangkutan. Izin yang diberikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara, dan kontrak *production sharing* atau pembagian hasil produksi.

Kuasa pertambangan merupakan wewenang yang diberikan kepada badan atau perorangan untuk melaksanakan usaha tersebut. Kuasa pertambangan dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

1. Kuasa pertambangan penyelidikan umum.
2. Kuasa pertambangan eksplorasi.

3. Kuasa pertambangan eksploitasi.
4. Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian, dan
5. Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan.

Dalam bidang pertambangan umum, seperti pertambangan emas, tembaga, dan perak, sistem kontrak yang digunakan adalah kontrak karya. Menurut sejarahnya, pada zaman pemerintah Hindia Belanda, sistem yang digunakan untuk pengelolaan bahan galian emas, perak dan tembaga adalah sistem konsesi. Sistem konsesi merupakan sistem dimana di dalam pengelolaan pertambangan umum, kepada perusahaan pertambangan tidak hanya diberi kuasa pertambangan, tetapi diberikan hak menguasai hak atas tanah. Jadi, hak yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan adalah kuasa pertambangan dan hak atas tanah. Sementara itu, sistem kontrak karya mulai diintroduksi pada tahun 1967, yaitu dimulai dengan telah di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Sistem kontrak ini diterapkan di Indonesia, yaitu sejak ditandatanganinya kontrak karya dengan PT. Freeport Indonesia atau yang sekarang PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sampai saat ini.

Perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara merupakan perjanjian yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka penanaman modal asing atau disingkat PMA). Perjanjian ini merupakan perjanjian pola campuran karena untuk ketentuan perpajakan mengikuti pola kontrak karya,

sedangkan pembagian hasil produksinya mengikuti pola kontrak *production sharing* (Saleng, 2004: 162-163).

Sebelum berlakunya otonomi daerah, pejabat yang berwenang memberikan izin kuasa pertambangan, izin kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara adalah pemerintah pusat, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan berlakunya otonomi daerah, kewenangan dalam pemberian izin tidak hanya menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) semata-mata, tetapi kini telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Pejabat yang berwenang menerbitkan hal tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, gubernur, dan bupati atau walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sistem kontrak yang digunakan dalam pertambangan minyak dan gas bumi adalah kontrak *production sharing* atau pembagian hasil produksi. Ada tiga sistem kontrak yang pernah berlaku pada pertambangan minyak dan gas bumi, yaitu sistem konsesi, perjanjian karya, dan kontrak *production sharing* atau pembagian hasil produksi (Salim HS, 2017:3-6).

Sistem konsesi berlaku pada zaman pemerintah Hindia Belanda, dari tahun 1910 sampai dengan tahun 1960. Hak-hak yang dinikmati pemegang konsesi adalah kuasa pertambangan dan hak atas tanah. Perjanjian karya, mulai berlaku pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1963. Dalam sistem ini, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi hanya diberi hak kuasa pertambangan saja, tidak meliputi hak atas tanah. Demikian pula sebaliknya, pemegang hak atas tanah



wajib mengizinkan pemegang kuasa pertambangan untuk melaksanakan tugas yang bersangkutan dengan tanah miliknya dengan menerima ganti kerugian.

Perusahaan tambang yang diberikan izin untuk mengusahakan bahan tambang terdiri dari:

1. Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri;
2. Perusahaan negara;
3. Perusahaan daerah;
4. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah;
5. Koperasi;
6. Badan atau perseorangan swasta;
7. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan atau daerah dengan koperasi dan atau badan atau perorangan swasta;
8. Pertambangan rakyat.

Walaupun institusi ini diberikan kewenangan untuk mengusahakan bahan galian, namun perusahaan yang paling menonjol untuk mengusahakan bahan galian didominasi oleh perusahaan asing, baik perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari asing maupun patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik. Dominannya perusahaan asing dalam pengusahaan bahan galian di Indonesia dikarenakan perusahaan itu mempunyai modal yang besar dan telah berpengalaman di dalam mengelolah bahan galian baik bahan mineral, minyak dan gas bumi, batu bara maupun yang lainnya.

Keberadaan perusahaan tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Ini disebabkan keberadaan perusahaan tambang itu telah

menimbulkan dampak negatif di dalam perusahaan bahan galian. Dampak negatif dari keberadaan perusahaan tambang adalah meliputi:

1. Rusaknya hutan yang berada di daerah lingkaran tambang;
2. Tercemarnya laut;
3. Terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukim di daerah lingkaran tambang;
4. Konflik antara masyarakat lingkaran tambang dengan perusahaan tambang.

Walaupun keberadaan perusahaan tambang menimbulkan dampak negatif, namun keberadaan perusahaan tambang juga menimbulkan dampak positif dalam pembangunan nasional. Dampak positif dari keberadaan perusahaan tambang adalah:

1. Meningkatkan devisa negara;
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah;
3. Menampung tenaga kerja;
4. Meningkatnya kondisi sosial ekonomi, kesehatan, dan budaya masyarakat yang bermukim di lingkaran tambang.

Dari aspek devisa negara dan pendapatan asli daerah, keberadaan perusahaan tambang sangat membantu dalam pembangunan nasional dan daerah. Begitu juga dalam bidang tenaga kerja, keberadaan perusahaan tambang telah menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja lokal, regional, nasional maupun internasional. Begitu juga dalam pengembangan masyarakat lingkaran tambang. Perusahaan pertambangan telah melaksanakan kewajibannya dengan baik untuk mengembangkan masyarakat lingkaran tambang.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) merupakan perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership (Newmont & Sumitomo), PT. Pukuafu Indah (Indonesia) dan PT Multi Daerah Bersaing. Newmont atau yang sekarang AMNT dan Sumitomo bertindak sebagai operator PT. AMNT yang menandatangani kontrak karya pada 1986 dengan pemerintah RI untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di dalam wilayah kontrak karya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) menemukan cebakan tembaga porfiri pada tahun 1990, yang kemudian diberi nama Batu Hijau. Setelah penemuan tersebut dilakukan lah pengkajian teknis dan lingkungan selama enam (6) tahun. Kajian tersebut disetujui pemerintah Indonesia pada 1996 dan menjadi dasar dimulainya pembangunan proyek tambang batu hijau, dengan total investasi US\$ 1,8 miliar. Proyek pembangunan tambang, pabrik dan prasarannya selesai pada 1999 dan mulai beroperasi secara penuh pada maret 2000. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan pemerintah provinsi NTB

per januari 2012 baru 58,3%, pemerintah kabupaten Sumbawa mencapai 78,5% dan pemerintah kabupaten Sumbawa Barat baru 47,9%. Adapun program tahun 2012 di antaranya untuk beasiswa sebanyak 1010 siswa dan mahasiswa, pengembangan 4 SD dengan standar nasional.

PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) telah melaksanakan program *Community Development* atau pengembangan masyarakat ini sejak beroperasi sampai dengan 2019 sekarang dan mengubah metode nya menjadi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di karenakan program *community development* yang merupakan bagian dari CSR itu sendiri. Adapun program CSR yang dilaksanakan PT AMNT sekarang (CSR Report PT AMNT), berupa:

1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Program pengembangan pendidikan.
3. Program bantuan pelayanan sosial atau kesehatan.
4. Program keagamaan.
5. Program peningkatan kesadaran lingkungan.

Pada umumnya diantara kelima program andalan PT AMNT itu, yang lebih dominan dan dapat dirasakan manfaatnya adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program tersebut berupa pembinaan kemitraan dengan usaha-usaha kecil dan mikro (UKM) yang berada di wilayah eksplorasi PT. AMNT merupakan perusahaan tambang besar di kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk meningkatkan usaha-usaha peningkatan ekonomi, dan turut memperbaiki kehidupan para karyawan serta masyarakat sekitar wilayah eksplorasi. PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dalam melaksanakan

program-program *Corporate Social Responsibility* atau CSR nya mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan berdasarkan kepada 4 (empat) pilar utama yaitu kesehatan masyarakat, pengembangan pendidikan, pengembangan ekonomi dan pengembangan usaha lokal. Dengan adanya program dari perusahaan ini masyarakat berharap dapat berpartisipasi dapat meningkatkan perekonomian secara berkesinambungan.

Seperti yang diamanatkan juga dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemerintah pusat memberikan hak dan wewenang seutuhnya kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, untuk menggali potensi alam yang ada agar dapat mandiri.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti ingin menggali dampak yang ditimbulkan dari program pemberdayaan ekonomi oleh PT. Amman Mineral Tambang Batu Hijau Sumbawa Blok Elang-Dodo terhadap kehidupan masyarakat di daerah tersebut, dalam hal ini peneliti memfokuskan pada Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa.

## **1.2. Fokus Masalah**

Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan pada tanggal 10 September 2018 lalu, penelitian ini memfokuskan masalah pada :

1. Daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah kecamatan Lunyuk kabupaten Sumbawa.
2. Subyek yang digunakan adalah warga kecamatan Lunyuk
3. Objek masalah dalam penelitian ini fokus pada program pemberdayaan masyarakat.



### **1.3. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak program pemberdayaan ekonomi oleh PT. Amman Mineral Tambang Batu Hijau Sumbawa Blok Elang-Dodo terhadap kehidupan ekonomi masyarakat kecamatan Lunyuk kabupaten Sumbawa?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat**

#### **1.4.1. Tujuan**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak program pemberdayaan ekonomi oleh PT. Amman Mineral Tambang Batu Hijau Sumbawa Blok Elang-Dodo terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa.

#### **1.4.2. Manfaat**

##### **1. Bagi Peneliti**

Peneliti dapat menerapkan pengetahuan atau teori yang selama ini diperoleh di bangku kuliah terhadap masyarakat sekitar.

##### **2. Bagi Praktisi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan saran untuk pemerintah pusat, daerah dan perusahaan agar dapat memberikan peluang kerja kepada masyarakat, serta dapat membantu merubah perekonomian warga yang dalam kategori masih kurang dan membantu merubah pola pikir mereka agar menjadi lebih maju dan dapat bersaing.

##### **3. Bagi Akademisi**

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan serta memberikan informasi dan masukan terhadap penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Yang Relevan

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Topik Penelitian	Pendekatan atau Metode	Hasil
1	Fanie irha esuma, 2008	Peranan LSM Mitra Bentala sebagai pendamping dalam upaya mensejahterakan masyarakat di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	Analisis peran (LSM)	(1) Proses pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh LSM Mitra Bentala memberikan pengaruh positif yang sangat besar dalam perubahan pola pikir dan pola kehidupan masyarakat yang berkaitan erat dengan lingkungannya; (2) Adanya sebuah perubahan cara pandang masyarakat tentang bagaimana

				<p>memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam pesisir secara adil, bijak dan juga memperhatikan keseimbangan ekosistem lingkungan agar terhindar dari bencana ekologis yang akan merugikan manusia</p>
2	Helmi Ad, 2010	Strategi pengembangan ekowisata	<p>Analisis melalui Matriks SWOT dan dilanjutkan dengan menentukan faktor kunci analisis SWOT melalui <i>In-dept</i></p>	<p>5 (lima) elemen <i>alternative</i> strategi terpilih dengan urutan prioritas utama dalam pelaksanaannya setelah dihitung dengan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) adalah sebagai berikut: (1) Kerjasama kemitraan dalam pengembangan</p>

			<p><i>interview</i></p> <p>serta</p> <p>perhitungan</p> <p><i>Quantitative</i></p> <p><i>Strategic</i></p> <p><i>Planing</i></p> <p><i>Matrix</i></p> <p>(QSPM)</p> <p>untuk</p> <p>penentuan</p> <p>skala</p> <p>prioritas</p> <p>pelaksanaan</p> <p>strategisnya,</p> <p>serta</p> <p>melalui</p> <p><i>Focus</i></p> <p><i>Group</i></p> <p><i>Discussion</i></p> <p>(FGD).</p>	<p>ekowisata baik sarana-prasarana, promosi, peningkatan kualitas SDM, penelitian dan pelesatarian alam (Skor 6,85), (2) Mengemas lebih atraktif atraksi wisata dengan mengedepankan Reputasi Gunung Krakatau (Skor 6,7), (3) Optimalisasi penggunaan IT untuk merebut pasar (Skor 6,7), (4) Kooperatif dengan pihak pesaing melalui penawaran produk wisata alam yang berbeda (Skor 6,45), (5) Koordinasi dan kerjasama semua pihak dalam penyelesaian konflik</p>
--	--	--	--	---

				tanah dan menjaga keamanan bersama (skor 5,8)
3	Eva Setriana, 202	Strategi LSM Mitra Bentala dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengelolaan kawasan hutan mangrove Pulau Pahawang	Pengkajian ulang terhadap hasil dari strategi yang sudah dijalankan melalui analisis SWOT	Peningkatan ekonomi melalui pemanfaatan mangrove dirasa kurang maksimal karena pemberdayaan masyarakat yang dilakukan hanya berfokus pada upaya pencapaian kelestarian hutan mangrovenya saja, sedangkan pencapaian kesejahteraan masyarakat belum tercapai secara optimal.



## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejahtera mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

### **2.2.2. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan**

James Anderson dalam Winarno (2008: 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

a) Tipe pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

b) Tipe kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

c) Tipe ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Menurut Edi Suharto (2012:61), tujuan kebijakan publik sosial, dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian

tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.

Menurut Edi Suharto (2012: 86), model-model yang umumnya digunakan dalam analisis kebijakan publik adalah:

- a. Model Prospektif adalah bentuk kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut juga model prediktif.
- b. Model Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah kebijakan diimplementasikan. Model ini biasa disebut model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.
- c. Model Integratif adalah model perpaduan antara kedua model di atas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan.

### **2.2.3. Dimensi Evaluasi Kebijakan**

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Winarno (2002: 171-174) setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

- a. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.

- b. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan.
- c. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.
- d. Evaluasi juga menyangkut unsur lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
- e. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Evaluasi kebijakan sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya dengan kebijakan itu sendiri. Pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi dampak kebijakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut.
- b. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan.
- c. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan

diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

Menurut M Solly Lubis (2007: 35), pada bidang ekonomi pemerintah harus mengatasi masalah ekonomi, perbedaan yang mencolok antara kaya dan miskin, antara ekonomi lemah dan ekonomi kuat, ketidakmerataan kesempatan kerja dan ketidakrataan pendapatan nasional. Menurut Subarsono (2012: 122) dampak merupakan akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan.

Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William Dunn dalam Agustino (2008:187), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut member sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum.

Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan adalah harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Dampak kebijakan dalam hal ini melingkupi komponen sebagai berikut:

- a. Kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, untuk mengukur seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan atau program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.



- b. Pelaksanaan kebijakan, yaitu untuk mengetahui apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, *responsive*, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan juga harus memperhatikan persoalan-persoalan hak asasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. Hal ini diperlukan oleh para evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar hak asasi warga. Selain itu untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini, evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan *output* dan *outcome* yang dihasilkan dalam suatu implementasi kebijakan.

#### **2.2.4. Fungsi-Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik**

Menurut Samudra dkk, dalam Nugroho (2003:186-187), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

a. Eksplanasi

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program.

b. Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

c. Audit

Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

#### d. Akunting

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

### 2.3. Konsep Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” (kekuasaan atau keberdayaan). Karena nya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan (Suharto, 2014:57). Kekuasaan sering dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat oran lain melakukan apa yang kita inginkan terlepas dan keinginan dan minat mereka, selanjutnya menurut Suharto (Edi.S:58) dikatakan pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dan kelaparan, bebas dan kebodohan, bebas dan kesakitan.
2. Terjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga masyarakat untuk secara mandiri mampu mengelola dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri serta mampu mengatasi tantangan persoalan di masa yang akan datang (Sumartiningsih, 2002:50). Pemberdayaan masyarakat dengan demikian tidak lah dicapai dalam waktu sekejap, tetapi pemberdayaan itu memerlukan proses. Proses yang dimaksud adalah dengan memberikan kemenangan (*authority*) aksesibilitas terhadap sumber daya dan lingkungan yang akomodatif.

Dalam Gunawan (1999), menyatakan upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu;

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata,

dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggung-jawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini.

Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian nya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalam nya, yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakat nya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang-berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah.

Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa

yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

### **2.3.1. Pengertian Pemberdayaan**

1. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport,1984).
2. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995).
3. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Definisi pemberdayaan yang dikemukakan para pakar sangat beragam dan kontekstual. Akan tetapi dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri.



### 2.3.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka *logic* sebagai berikut:

1. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi;
2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran;
3. Kekuasaan akan membangun sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; dan
4. Konsep sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Prajono dan Pranarka, 1996:229).

Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*). Pengalaman empirik dan pengalaman historis dari format sosial ekonomi yang dikotomis ini telah melahirkan berbagai pandangan mengenai pemberdayaan.

*Pandangan pertama*, pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan atau *power to nobody*. Pandangan ini didasari oleh keyakinan, bahwa kekuasaan telah menterasingkan dan menghancurkan manusia dari eksistensinya. Oleh sebab itu

untuk mengembalikan eksistensi manusia dan menyelamatkan manusia dari keterasingan dan penindasan, maka kekuasaan harus dihapuskan.

*Pandangan kedua*, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang (*power to every body*). Pandangan ini didasarkan pada keyakinan, bahwa kekuasaan yang terpusat akan menimbulkan *abuse* atau penyalahgunaan dan cenderung mengeliminasi hak normatif manusia yang tidak berkuasa atau yang dikuasai. Oleh sebab itu, kekuasaan harus didistribusikan ke semua orang, agar semua orang dapat mengaktualisasikan diri.

*Pandangan ketiga*, pemberdayaan adalah penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat. Pandangan ini adalah pandangan yang paling moderat dari dua pandangan lainnya. Pandangan ini adalah antitesis dari pandangan *power to nobody* dan pandangan *power to every body*. Menurut pandangan ini, *Power to nobody* adalah kemustahilan dan *power to every body* adalah chaos dan anarki. Oleh sebab itu menurut pandangan ketiga, yang paling realistis adalah *power to powerless* (Pranarka dan Vidhyandika, 1996 : 45-70).

Ketiga pandangan tersebut di atas, kalau dikaji secara seksama, ternyata berpengaruh cukup signifikan dalam konsep dan praksis pemberdayaan. Di lapangan, paling tidak ada 3 konsep pemberdayaan:

*Konsep pertama*, pemberdayaan yang hanya berkuat di ‘daun’ dan ‘ranting’ atau pemberdayaan konformis. Karena struktur sosial, struktur ekonomi, dan struktur ekonomi sudah dianggap, diberikan atau *given*, maka pemberdayaan adalah usaha bagaimana masyarakat harus menyesuaikan dengan yang sudah diberikan tersebut. Bentuk aksi dari konsep ini merubah sikap mental masyarakat

dan pemberian santunan, seperti misalnya pemberian bantuan modal, pembangunan prasarana pendidikan, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai *magical paradigm* atau paradigma magis.

*Konsep kedua*, pemberdayaan yang hanya berkuat di ‘batang’ atau pemberdayaan reformis. Artinya, secara umum tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya, sudah tidak ada masalah. Masalah ada pada kebijakan operasional. Oleh sebab itu, pemberdayaan gaya ini adalah mengubah dari *top down* menjadi *bottom up*, sambil mengembangkan sumber daya manusianya, menguatkan kelembagaannya, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai *naive paradigm* atau paradigma naif.

*Konsep ketiga*, pemberdayaan yang hanya berkuat di ‘akar’ atau pemberdayaan struktural. Karena tidakberdayanya masyarakat disebabkan oleh struktur politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang tidak memberi ruang bagi masyarakat lemah untuk berbagi kuasa dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya, maka stuktur itu yang harus ditinjau kembali.

Artinya, pemberdayaan hanya dipahami sebagai penjungkirbalikan tatanan yang sudah ada. Semua tatanan dianggap salah dan oleh karenanya harus dihancurkan, seperti misalnya memfasilitasi rakyat untuk melawan pemerintah, memprovokasi masyarakat miskin untuk melawan orang kaya dan atau pengusaha, dan sejenisnya. Singkat kata, konsep pemberdayaan masyarakat yang hanya berkuat pada akar adalah penggulingan *the powerful*.

Konsep ketiga ini sering disebut sebagai *critical paradigm* atau paradigma kritis. Oleh Pranarka dan Moelyarto (1996), karena kesalah-pahaman mengenai

pemberdayaan ini, maka menimbulkan pandangan yang salah, seperti bahwa pemberdayaan adalah proses penghancuran kekuasaan, proses penghancuran negara, dan proses penghancuran pemerintah.

Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya pendapatan masyarakat lemah. Pendapatan masyarakat pada umumnya berasal dari dua anasir, yaitu dari upah atau gaji dan dari surplus usaha. Dari anasir upah atau gaji, pada umumnya masyarakat yang tunadaya atau tidak berdaya hanya menerima upah atau gaji rendah. Rendahnya gaji atau upah yang diterima masyarakat tunadaya ini disebabkan karena mereka pada umumnya memiliki ketrampilan yang terbatas dan sikap mental yang buruk (*need achievement* atau butuh prestasi rendah, tidak disiplin).

Rendahnya keterampilan masyarakat disebabkan karena akses atau kesempatan mereka untuk mendapatkan pelayanan pendidikannya pada umumnya buruk. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang cukup realistis untuk masyarakat pekerja yang tunadaya atau tidak berdaya, adalah melalui *affirmative action* atau aksi afirmatif (misalnya subsidi pendidikan bagi masyarakat tunadaya) di bidang pendidikan. Untuk melakukan *affirmative action* atau tindakan afirmatif bagi masyarakat tunadaya, maka pemerintah harus memiliki dana. Untuk mendapatkan dana dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal, misalnya dengan pajak progresif.

Dari berbagai tulisan Sumodiningrat (1999), konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:



1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi:
  - a. Pengalokasian sumber pemberdayaan sumber daya;
  - b. Penguatan kelembagaan;
  - c. Penguasaan teknologi; dan
  - d. Pemberdayaan sumber daya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.



5. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah:
  - a. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal);
  - b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar pengambil harga atau disebut *price taker*;
  - c. Pelayanan pendidikan dan kesehatan; Penguatan industri kecil;
  - d. Mendorong munculnya wirausaha baru; dan
  - e. Pemerataan spasial
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup:
  - a. Peningkatan akses bantuan modal usaha;
  - b. Peningkatan akses pengembangan SDM (sumber daya manusia) ; dan
  - c. Peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Dari enam butir pokok mengenai konsep pemberdayaan masyarakat ini, dapat disimpulkan, bahwa:

1. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun saja, atau cabang saja, atau batang saja, atau akar saja; karena permasalahan yang dihadapi memang ada pada masing-masing aspek;
2. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumber daya manusia nya, penyediaan prasarana nya, dan penguatan posisi tawar nya;

3. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat; untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien; dan
5. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui pendekatan kelompok.

### **2.3.3. Konsep Ekonomi Kerakyatan**

Menurut Mubyarto (1998 : 73), dalam bukunya yang berjudul : Reformasi Sistem Ekonomi (dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan), menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang demokratis yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat kecil. Sedangkan ekonomi kerakyatan menurut Zulkarnain (2006 : 93), adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat.

Penjelasan pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan yakni sistem ekonomi dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, serta di bawah kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian salah satu pilar dari demokrasi ekonomi itu adalah keikut-sertaan semua orang dalam kegiatan produksi.

Menurut Mubyarto (1998 : 71), sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, kedaulatan rakyat dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Dalam prakteknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring (*network*) yang menghubungkan sentra-sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi untuk terbentuknya jejaring pasar domestik dan pelaku usaha masyarakat. Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan yaitu:

*Pertama*, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil, yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan nekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi skala kecil.

*Kedua*, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis, disebut pembangunan partisipatif (*participatory development*).

Sistem perekonomian nasional Indonesia saat ini adalah perekonomian nasional kerakyatan yang mulai berlaku sejak terjadinya reformasi 1998, yang ditetapkan MPR Nomor /IV/MPR/1999 yang mengatur Garis-Garis Besar Haluan Negara (GGBHN).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada

ekonomi rakyat yang bertumpuh pada mekanisme pasar yang adil dan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat.

#### **2.3.4. Implementasi Ekonomi Kerakyatan**

Ekonomi rakyat tumbuh secara natural karena adanya sejumlah potensi ekonomi di sekelilingnya. Mulanya mereka tumbuh tanpa adanya insentif apapun atau dengan kata lain hanya mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta peluang pasar. Namun pada saat perekonomian Indonesia dilanda krisis moneter mulai pada pertengahan tahun 1997 lalu, terbukti ekonomi rakyat yang tidak mengandalkan sistem moneter terutama terhadap US \$, sebagian besar usaha rakyat tersebut mampu bertahan dan melanjutkan usahanya hingga saat ini.

Seringkali ekonomi kerakyatan ini kurang diberi ruang gerak oleh sistem monopoli disempitkan, sama sekali didesak dan dipadamkan (Soekarno, Indonesia Menggugat, 1930: 31). Jika kita mengacu pada Pancasila dasar negara atau pada ketentuan pasal 33 UUD 1945, maka memang ada kata kerakyatan tetapi harus tidak dijadikan sekedar kata sifat yang berarti merakyat. Kata kerakyatan sebagaimana bunyi sila ke-4 Pancasila harus ditulis lengkap yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang artinya tidak lain adalah demokrasi ala Indonesia. Jadi ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis. Pengertian demokrasi ekonomi atau

(sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

“Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hasil penelitian Laica Marzuki (UNHAS, 1999), menjelaskan bahwa ekonomi kerakyatan saat ini adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, dimana ekonomi rakyat sendiri adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang secara swadaya mengelolah sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan yang selanjutnya disebut usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Maka dari itulah ekonomi kerakyatan layak diperjuangkan, dan terus dikembangkan. Sistem ekonomi kerakyatan ini



merupakan sebuah konsep yang memberdayakan. Namun hal itu belum cukup, harus ada teori lain yang bisa menopang atau menjadi turunan yang bisa dikompromikan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat.

#### **2.3.5. Ciri-Ciri Khusus Ekonomi Kerakyatan**

Menurut Soeharto Prawiro Kusumo (2001: 4), mengemukakan beberapa ciri dan prinsip yang terdapat dalam konsep demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Adapun Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ciri utama sistem demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan adalah penegakan prinsip keadilan disertai kepedulian terhadap yang lemah. Sistem ekonomi tersebut harus memungkinkan seluruh potensi bangsa, baik sebagai konsumen, pengusaha, atau pun sebagai tenaga kerja. Tanpa perlindungan dan hak untuk memajukan kemampuan nya dalam rangka meningkatkan taraf hidup nya dan partisipasinya secara aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk dalam memelihara kekayaan alam dan lingkungan hidup. Didalam melaksanakan kegiatan tersebut, semua pihak harus mengacu kepada peraturan yang berlaku.

2. Sejalan dengan sifat dan ciri pertama, adalah pemihakan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai dengan kemampuannya. Pemerintah melaksanakannya melalui langkah-langkah yang ramah pasar. Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKM) termasuk petani dan nelayan kecil, merupakan prioritas utama dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan.

Dengan demikian, misalnya hubungan kemitraan antar usaha besar dan usaha kecil menengah (UKM) harus berdasarkan kompetensi bukan belas kasihan. Untuk itu, prioritas dilakukan penghapusan praktek-praktek dan perilaku-perilaku ekonomi di luar aturan permainan yang dianggap wajar dan adil oleh masyarakat seperti praktek monopoli, mengembangkan dengan sistem perpajakan progresif dan deregulasi yang diarahkan untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi.

1) Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian pedesaan. Oleh karena itu, upaya mempercepat pembangunan pedesaan, termasuk daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan, dan termasuk daerah terbelakang lainnya harus menjadi prioritas. Hal ini dilakukan antara lain, dengan meningkatkan pembangunan prasarana pedesaan dalam mendukung pengembangan keterkaitan desa-desa sebagai bentuk jaringan produksi dan distribusi yang saling menguntungkan.

Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya, seperti

hutan, laut, air, udara, dan mineral. Semuanya harus dikelola secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat masyarakat adat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### **2.4. Konsep Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan (Emil Salim, 1990) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hekekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang.

Menurut kementerian lingkungan hidup atau disingkat KLH (1990), pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu :

1. Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*;
2. Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya;
3. Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* atau pun *replaceable resource*.

Senada dengan konsep diatas, Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergenerational equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumber daya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.
- b. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang atau pun lestari antar generasi. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Fauzi (2004), dari sisi ekonomi setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan;

*Pertama*, menyangkut alasan moral. Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral

perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama.

*Kedua*, menyangkut alasan ekologi. Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi.

*Ketiga*, yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktifitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antar generasi (*intergeneration welfare maximization*).

Sutamihardja (2004), dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan kebijakan yang mungkin dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumber daya alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang. Pembangunan berkelanjutan juga mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang.



Pengembangan konsep pembangunan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan yang wajar secara sosial dan kultural, menyebarkan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi yang berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua orang mampu mencitakannya. Namun demikian ada kecendrungan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut akan tergantung pada kebutuhan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi ataupun kebutuhan produksi pada skala maksimum.

Pembangunan berkelanjutan jelas mensyaratkan pertumbuhan ekonomi di tempat yang kebutuhan utamanya belum bisa konsisten dengan pertumbuhan ekonomi, asalkan isi pertumbuhan mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Akan tetapi kenyataannya aktifitas produksi yang tinggi dapat saja terjadi bersamaan dengan kemelaratan yang tersebar luas. Kondisi ini dapat membahayakan lingkungan. Jadi pembangunan berkelanjutan mensyaratkan masyarakat terpenuhi kebutuhan dengan cara meningkatkan potensi produksi mereka dan sekaligus menjamin kesempatan yang sama semua orang.

Bagaimana cara hal ini dapat dilakukan? Pemerintah atau pun perusahaan di bidang pertambangan tentunya memerlukan suatu strategi kebijakan yang realistis dan dapat dilaksanakan disertai dengan sistem pengendalian yang tepat. Eksploitasi sumber daya alam disarankan sebaiknya pada sumber daya alam yang *replaceable* atau tergantikan sehingga ekosistem atau sistem lingkungan dapat dipertahankan.

## **2.5. Konsep Pertambangan**

### **2.5.1. Pengertian Pertambangan**

Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan. Pengertian pertambangan mineral dan pertambangan batu bara jelaslah berbeda. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan yang dimaksud pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

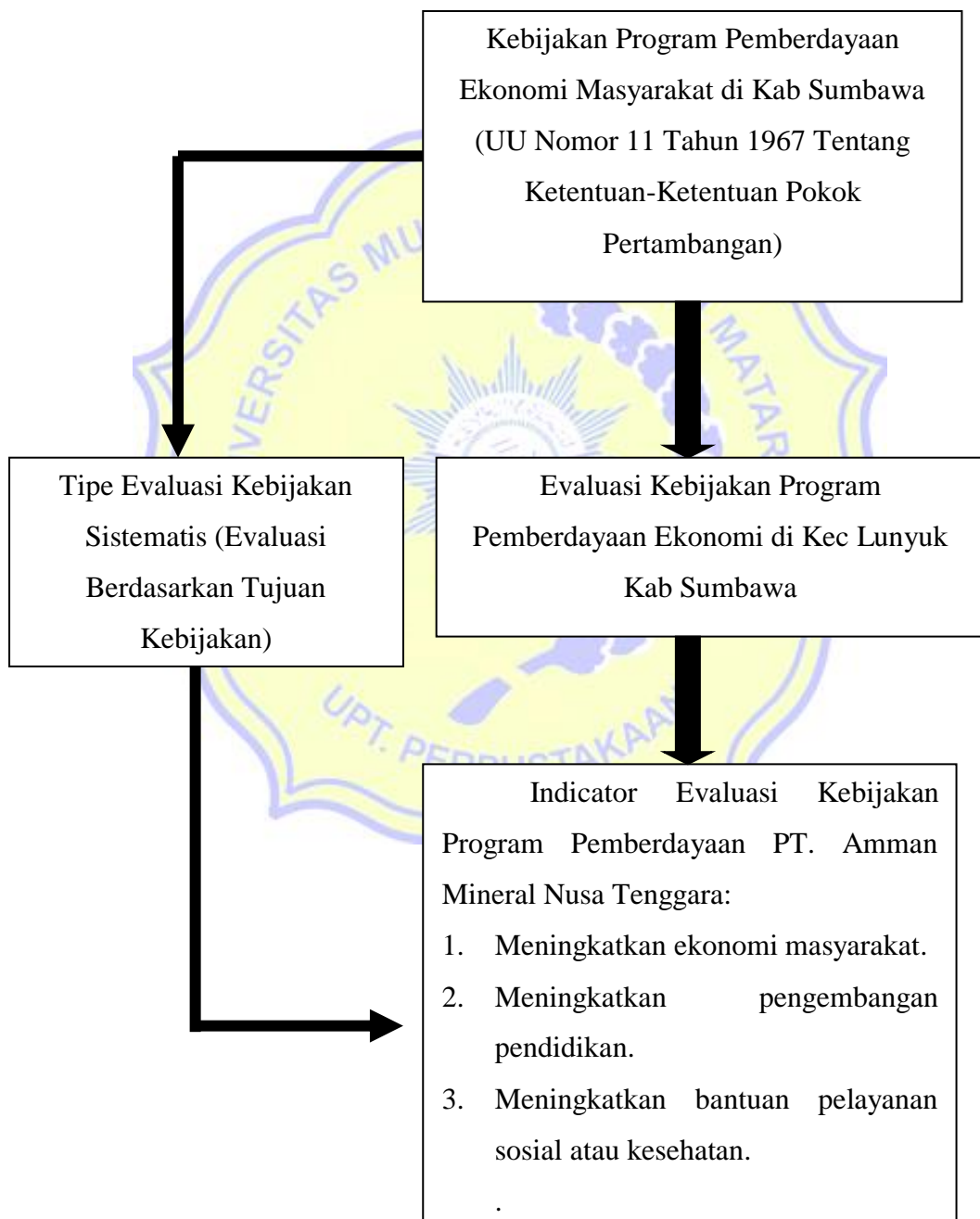
## **2.6. PT Amman Mineral Nusa Tenggara**

PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) adalah perusahaan pertambangan yang diperoleh MedcoEnergi adalah perusahaan publik Indonesia yang bergerak dalam bidang energi terintegrasi. Perusahaan ini bermula dari sebuah perusahaan kontraktor pertikelir di bidang jasa pengeboran minyak dan gas bumi di daratan (*onshore drilling*), Meta Epsi Pribumi Drilling Co, yang didirikan Arifin Panigoro pada tanggal 9 Juni 1980 melalui akuisisi 50% saham di

PT Amman Mineral Investama yang secara tidak langsung mengontrol 82,2% saham AMNT pada 2 November 2016 lalu. AMNT mengoperasikan 87.000 ha tambang tembaga dan emas yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara, Indonesia. Pada tingkat produksi saat ini, usia tambang Batu Hijau diperkirakan akan terus berlanjut sampai 2023. AMNT saat ini juga mengeksplorasi bagian-bagian lain di wilayah kontrak karya-nya seperti prospek eksplorasi Elang Dodo.



## 2.7. Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Selanjutnya penelitian kualitatif menurut Moleong (2013:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2013:29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel sebagaimana adanya.

#### **3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian sangat penting ditentukan, sehingga mempermudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Adapun tempat penelitian fokusnya di kantor cabang Sumbawa perusahaan tambang PT. Amman Mineral Nusa Tenggara



(AMNT) dan di kecamatan Lunyuk mengingat fokus utama keduanya sangat penting dalam mencari informasi baik lisan atau pun tulisan.

Adapun pemilihan lokasi yang peneliti pilih selain mudah dijangkau oleh peneliti, serta efektif, efisien dari segi waktu, biaya dan tenaga. Kecamatan ini merupakan suatu kecamatan yang memiliki penduduk yang cukup banyak serta memiliki latar pendidikan yang bermacam-macam. Pertimbangan dipilihnya lokasi-lokasi ini, peneliti ingin mengetahui peran dari perusahaan tambang dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-programnya.

Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan ini direncanakan akan dimulai dari tahap persiapan observasi sampai dengan penulisan laporan. Secara keseluruhan semua kegiatan dilakukan selama kurang lebih satu bulan, yaitu sejak 8 April sampai 8 Mei 2019.

### **3.3. Teknik Pengumpulan Informan**

#### **3.3.1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:80). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan desa di kecamatan Lunyuk.

#### **3.3.2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:81). Adapun teknik pengumpulan sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling*

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:85). Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil sampel yaitu melibatkan dua (2) kepala desa dan camat kecamatan lonyuk. Karena dimana 2 desa tersebut merupakan lokasi tempat dimana sebagian dari aktifitas kegiatan eksplorasi tambang dilakukan oleh perusahaan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT) dengan akses yang dekat dengan Blok Elang-Dodo Rinti.

### **3.4. Instrumen Penelitian**

Menurut Arikunto (2002:136) instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, dan pedoman wawancara.

### **3.5. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Arikunto (1998:144) sumber data adalah subjek dari mana suatu data pada diperoleh. Menurut Moleong (2001:112), pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil bangunan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **3.5.1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber nya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Informasi dari pimpinan dan staff pegawai perusahaan tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) kantor cabang Sumbawa.
- b. Informasi dari camat kecamatan Lunyuk.
- c. Informasi dari 2 kepala desa kecamatan Lunyuk.
- d. Informasi dari masyarakat setempat.

**Tabel 3.1**  
**Data Primer Dari Berbagai Narasumber**

No	Nama Data	Sumber Data	Metode Pengumpulan Data
1.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	-Humas PT. AMNT. -Manager Comdev. -Penyuluh pertanian. -Peternak sapi. -Tokoh pemuda. -Kepdes Lunyuk Rea. -Camat Lunyuk.	Wawancara mendalam
2.	Pengembangan Pendidikan	-Karyawan bidang pendidikan PT. AMNT. -PLT Kepala desa Lunyuk Rea. -Orang tua murid. -Wali murid.	Wawancara mendalam
3.	Pelayanan Kesehatan	-Karyawan bidang kesehatan PT. AMNT.	Wawancara mendalam
<b>Observasi Awal</b>			
	Pengenalan daerah radius lingkaran tambang	-Tokoh masyarakat -Tokoh adat	Wawancara mendalam

	-Tokoh pemuda	
--	---------------	--

### 3.5.2. Data Skunder

Data skunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber nya. Penelitian ini sumber data skunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti sumber buku, majalah, ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat Sumbawa.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2005:62), “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

### **3.6.1. Teknik Observasi**

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), “Observasi adalah pengamatan dan pernyataan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian”. Adanya observasi penelitian dapat mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh perusahaan tambang. Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.

### **3.6.2. Teknik Wawancara**

Menurut Sugiyono (2010:194), pengertian wawancara sebagai berikut:

Wawancara digunakan sebagai pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena penelitian menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari.

Wawancara penelitian ini dilakukan pimpinan dan staff pegawai perusahaan tambang PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), camat, kepala desa dan masyarakat kecamatan Lunyuk. Metode yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh yaitu data tentang profil perusahaan, kecamatan dan data jumlah data-data sarana perekonomian dan lain-lain. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti



dan mengharuskan antara peneliti serta narasumber bertatap muka sehingga dapat melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara.

### **3.6.3. Teknik Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber, misal lembaga swadaya masyarakat (LSM). Metode dokumentasi menurut Arikunto (2006:231) yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

Berdasarkan kedua pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal media cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteliti.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan

strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses data berikutnya.

2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

